PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penerimaan Dana Transfer Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk membantu daerah penerima dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan sebagai kebijakan Pemerintah Pusat dan pemberian bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dalam rangka pengadaan Roda 2 (Dua) bagi Bidan Desa dan Petugas Kesehatan Rampi dan biaya pembinaan kepada Satuan Pol-PP Kabupaten Luwu Utara yang belum ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud mendesak untuk segera dilaksanakan, khususnya kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Dana Insentif Daerah yang apabila menunggu penetapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikhawatirkan tidak akan selesai atau terealisasi di tahun anggaran berkenan, maka perlu melakukan perubahan III (Ketiga) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 mendahului Penetapan Peraturan Bupati Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. bahwa perubahan yang dilakukan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah penambahan anggaran Pendapatan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, penambahan Anggaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda, Dinas Kesehatan dan Satuan Pol-PP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keungan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011;

20. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1904/VI/Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011.

2. Keputusan Badan Pengelolaan Keunagan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1272/IV/ Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni huruf C angka 1 sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri dari

NO.	URAIAN	ANGGARAN POKOK	ANGGARAN PERUBAHAN III (KETIGA)	BERTAMBAH/BERKURANG
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**Rp. 555.160.561.549,00**	**Rp. 622.003.686.549,00**	**Rp. 66.843.125.000,00**
a.	**Pendapatan Asli Daerah**	**Rp. 35.011.986.473,00**	**Rp. 35.011.986.473,00**	**Rp. -**
1.	Pajak Daerah	Rp. 4.251.588.346,00	Rp. 4.251.588.346,00	Rp. -
2.	Retribusi Daerah	Rp. 24.534.717.500,00	Rp. 24.534.717.500,00	Rp. -
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp. 865.784.952,00	Rp. 865.784.952,00	Rp. -
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 5.359.895.675,00	Rp. 5.359.895.675,00	Rp. -
b.	**Dana Perimbangan**	**Rp. 469.983.374.476,00**	**Rp. 469.983.374.476,00**	**Rp. -**
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 36.407.884.476,00	Rp. 36.407.884.476,00	Rp. -
2.	Dana Alokasi Umum	Rp. 377.853.290.000,00	Rp. 377.853.290.000,00	Rp. -
3.	Dana Alokasi Khusus	Rp. 55.722.200.000,00	Rp. 55.722.200.000,00	Rp. -
c.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**Rp. 50.165.200.600,00**	**Rp. 117.008.325.600,00**	**Rp. 66.843.125.000,00**
1.	H i b a h	Rp. 1.511.650.000,00	Rp. 27.425.494.000,00	Rp. 25.913.844.000,00
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi da Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 9.973.240.000,00	Rp. 9.973.240.000,00	Rp. -
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 25.913.843.200,00	Rp. 66.683.124.200,00	Rp. 40.769.281.000,00
4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 12.065.967.400,00	Rp. 12.225.967.400,00	Rp. 160.000.000,00
5.	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 700.500.000,00	Rp. 700.500.000,00	Rp. -
2.	**BELANJA DAERAH**	**Rp. 567.360.561.549,00**	**Rp. 634.203.686.549,00**	**Rp. 66.843.125.000,00**
a.	**Belanja Tidak Langsung**	**Rp. 313.046.323.269,00**	**Rp. 313.132.180.269,00**	**Rp. 85.857.000,00**
1.	Belanja Pegawai	Rp. 279.411.721.800,00	Rp. 279.411.721.800,00	Rp. -
2.	Belanja Subsidi	Rp. 22.500.000,00	Rp. 22.500.000,00	Rp. -
3.	Belanja Hibah	Rp. 4.070.000.000,00	Rp. 4.155.857.000,00	Rp. 85.857.000,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.072.573.692,00	Rp. 3.072.573.692,00	Rp. -
5.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 629.822.000,00	Rp. 629.822.000,00	Rp. -
6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 25.173.860.922,00	Rp. 25.173.860.922,00	Rp. -
7.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 665.844.855,00	Rp. 665.844.855,00	Rp. -
b.	**Belanja Langsung**	**Rp. 254.314.238.280,00**	**Rp. 321.071.506.280,00**	**Rp. 66.757.268.000,00**
1.	Belanja Pegawai	Rp. 9.166.812.400,00	Rp. 14.332.409.800,00	Rp. 5.165.597.400,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 134.249.575.237,00	Rp. 148.416.645.837,00	Rp. 14.167.070.600,00
3.	Belanja Modal	Rp. 110.897.850.643,00	Rp. 158.322.450.643,00	Rp. 47.424.600.000,00
	D e f i s i t	***Rp. (12.200.000.000,00)***	***Rp. (12.200.000.000,00)***	***Rp. -***
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**Rp. 12.200.000.000,00**	**Rp. 12.200.000.000,00**	**Rp. -**
a.	**Penerimaan Pembiayaan**	**Rp. 29.146.031.362,00**	**Rp. 29.146.031.362,00**	**Rp. -**
1.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 28.846.031.362,00	Rp. 28.846.031.362,00	
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	
b.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**Rp. 16.946.031.362,00**	**Rp. 16.946.031.362,00**	**Rp. -**
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp. -	Rp. -	
2.	Pembayaran Pokok Utang	Rp. -	Rp. -	
3.	Dana Bergulir	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	
4.	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp. 16.646.031.362,00	Rp. 16.646.031.362,00	
	SILPA*) Anggaran Tahun Berkenan...	***Rp. -***	***Rp. -***	***Rp. -***

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (Satu) Pasal, yakni Pasal 3a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3a

Perubahan Penjabaran APBD dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 akan disesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dan/atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 26 Agustus 2011

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten	
3.	Kepala DPKD	
4.	Kabid Anggaran	
5.	Kasi Penyusunan APBD	

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 26 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH

MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 18 .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TANGGAL 26 Agustus 2011

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN III (KETIGA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN				
		ANGGARAN POKOK	ANGGARAN PERUBAHAN III (KETIGA)	BERTAMBAH / BERKURANG		% ANGGARAN
				Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	***PENDAPATAN***	***Rp 555,160,561,549.00***	***Rp 622,003,686,549.00***	***Rp 66,843,125,000.00***	***12.04%***	***100.00%***
1. 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**Rp 35,011,986,473.00**	**Rp 35,011,986,473.00**	**Rp -**	**0.00%**	**5.63%**
1. 1 1	Hasil Pajak Daerah	Rp 4,251,588,346.00	Rp 4,251,588,346.00	Rp -	0.00%	0.67%
1. 1 2	Hasil Retribusi Daerah	Rp 24,534,717,500.00	Rp 24,534,717,500.00	Rp -	0.00%	3.45%
1. 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 865,784,952.00	Rp 865,784,952.00	Rp -	0.00%	0.32%
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 5,359,895,675.00	Rp 5,359,895,675.00	Rp -	0.00%	1.20%
1. 2	**DANA PERIMBANGAN**	**Rp 469,983,374,476.00**	**Rp 469,983,374,476.00**	**Rp -**	**0.00%**	**88.32%**
1 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 36,407,884,476.00	Rp 36,407,884,476.00	Rp -	0.00%	7.42%
1 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 377,853,290,000.00	Rp 377,853,290,000.00	Rp -	0.00%	72.34%
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 55,722,200,000.00	Rp 55,722,200,000.00	Rp -	0.00%	8.56%
1. 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**Rp 50,165,200,600.00**	**Rp 117,008,325,600.00**	**Rp 66,843,125,000.00**	**133.25%**	**6.05%**
1. 3 1	Pendapatan Hibah	Rp 1,511,650,000.00	Rp 27,425,494,000.00	Rp 25,913,844,000.00	1714.28%	0.33%
1. 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 9,973,240,000.00	Rp 9,973,240,000.00	Rp -	0.00%	1.97%
. 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 25,913,843,200.00	Rp 66,683,124,200.00	Rp 40,769,281,000.00	157.33%	1.33%
. 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 12,065,967,400.00	Rp 12,225,967,400.00	Rp 160,000,000.00	1.33%	2.25%
1. 3 6	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 700,500,000.00	Rp 700,500,000.00	Rp -	0.00%	0.18%
2	***BELANJA***	***Rp 567,360,561,549.00***	***Rp 634,203,686,549.00***	***Rp 66,843,125,000.00***	***11.78%***	***100.00%***
2 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**Rp 313,046,323,269.00**	**Rp 313,132,180,269.00**	**Rp 85,857,000.00**	**0.03%**	**49.37%**
2 1 1	**Belanja Pegawai**	**Rp 279,411,721,800.00**	**Rp 279,411,721,800.00**	**Rp -**	**0.00%**	**44.06%**
	- Belanja Pegawai Gaji PNS	*Rp 218,725,173,000.00*	Rp 218,725,173,000.00	Rp -	*0.00%*	34.49%
	- Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS	*Rp 49,627,335,000.00*	Rp 49,627,335,000.00	Rp -	*0.00%*	7.83%
	- Belanja Pegawai Lainnya	*Rp 11,059,213,800.00*	Rp 11,059,213,800.00	Rp -	*0.00%*	1.74%
2 1 3	Belanja Subsidi	Rp 22,500,000.00	Rp 22,500,000.00	Rp -	0.00%	5.73%
2 1 4	Belanja Hibah	Rp 4,070,000,000.00	Rp 4,155,857,000.00	Rp 85,857,000.00	2.11%	5.73%
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 3,072,573,692.00	Rp 3,072,573,692.00	Rp -	0.00%	0.61%
2 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	Rp 629,822,000.00	Rp 629,822,000.00	Rp -	0.00%	0.09%
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	Rp 25,173,860,922.00	Rp 25,173,860,922.00	Rp -	0.00%	3.84%
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	Rp 665,844,855.00	Rp 665,844,855.00	Rp -	0.00%	0.13%
2 2	**BELANJA LANGSUNG**	**Rp 254,314,238,280.00**	**Rp 321,071,506,280.00**	**Rp 66,757,268,000.00**	**26.25%**	**50.63%**
2 2 1	Belanja Pegawai	Rp 9,166,812,400.00	Rp 14,332,409,800.00	Rp 5,165,597,400.00	56.35%	0.00%
2 2 2	Belanja Barang dan jasa	Rp 134,249,575,237.00	Rp 148,416,645,837.00	Rp 14,167,070,600.00	10.55%	0.00%
2 2 3	Belanja Modal	Rp 110,897,850,643.00	Rp 158,322,450,643.00	Rp 47,424,600,000.00	42.76%	0.00%
	SURPLUS / (DEFISIT)	**Rp (12,200,000,000.00)**	**Rp (12,200,000,000.00)**	**Rp -**	**0.00%**	**100.00%**
	PEMBIAYAAN DAERAH	**Rp 12,200,000,000.00**	**Rp 12,200,000,000.00**	**Rp -**	**0.00%**	**100.00%**
3 1	***PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH***	***Rp 29,146,031,362.00***	***Rp 29,146,031,362.00***	***Rp -***	***0.00%***	***82.30%***
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 28,846,031,362.00	Rp 28,846,031,362.00	Rp -	0.00%	81.27%
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp -	0.00%	1.03%
3 2	***PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH***	***Rp 16,946,031,362.00***	***Rp 16,946,031,362.00***	***Rp -***	***0.00%***	***100.00%***
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	38.48%
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	0.00%
3 2 5	Pinjaman Dana Bergulir	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp -	0.00%	61.52%
3 2 6	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp 16,646,031,362.00	Rp 16,646,031,362.00	Rp -	0.00%	61.52%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	***Rp -***	***Rp -***	***Rp -***		

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten	
3.	Kepala DPKD	
4.	Kabid Anggaran	
5.	Kasi Penyusunan APBD	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TANGGAL 26 Agustus 2011

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN III (KETIGA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2011

PERUBAHAN ANGGARAN DARI PERUBAHAN II (KEDUA) KE PERUBAHAN III (KETIGA)

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN				
		PERUBAHAN KEDUA	PERUBAHAN KETIGA	BERTAMBAH / BERKURANG		% ANGGARAN
				Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	*PENDAPATAN*	*Rp 597,706,405,549.00*	*Rp 622,003,686,549.00*	*Rp 24,297,281,000.00*	*4.07%*	*100.00%*
1. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 35,011,986,473.00	Rp 35,011,986,473.00	Rp -	0.00%	5.63%
1. 1 1	Hasil Pajak Daerah	Rp 4,251,588,346.00	Rp 4,251,588,346.00	Rp -	0.00%	0.67%
1. 1 2	Hasil Retribusi Daerah	Rp 24,534,717,500.00	Rp 24,534,717,500.00	Rp -	0.00%	3.45%
1. 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 865,784,952.00	Rp 865,784,952.00	Rp -	0.00%	0.32%
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 5,359,895,675.00	Rp 5,359,895,675.00	Rp -	0.00%	1.20%
1. 2	DANA PERIMBANGAN	Rp 469,983,374,476.00	Rp 469,983,374,476.00	Rp -	0.00%	88.32%
1 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 36,407,884,476.00	Rp 36,407,884,476.00	Rp -	0.00%	7.42%
1 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 377,853,290,000.00	Rp 377,853,290,000.00	Rp -	0.00%	72.34%
2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 55,722,200,000.00	Rp 55,722,200,000.00	Rp -	0.00%	8.56%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 92,711,044,600.00	Rp 117,008,325,600.00	Rp 24,297,281,000.00	26.21%	6.05%
1. 3 1	Pendapatan Hibah	Rp 27,425,494,000.00	Rp 27,425,494,000.00	Rp -	0.00%	0.33%
1. 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 9,973,240,000.00	Rp 9,973,240,000.00	Rp -	0.00%	1.97%
1. 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 42,545,843,200.00	Rp 66,683,124,200.00	Rp 24,137,281,000.00	56.73%	1.33%
1. 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 12,065,967,400.00	Rp 12,225,967,400.00	Rp 160,000,000.00	1.33%	2.25%
1. 3 6	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 700,500,000.00	Rp 700,500,000.00	Rp -	0.00%	0.18%
2	*BELANJA*	*Rp 609,906,405,549.00*	*Rp 634,203,686,549.00*	*Rp 24,297,281,000.00*	*3.98%*	*100.00%*
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 313,132,180,269.00	Rp 313,132,180,269.00	Rp -	0.00%	49.37%
2 1 1	Belanja Pegawai	Rp 279,411,721,800.00	Rp 279,411,721,800.00	Rp -	0.00%	44.06%
	- Belanja Pegawai Gaji PNS	*Rp 218,725,173,000.00*	*Rp 218,725,173,000.00*	Rp -	*0.00%*	34.49%
	- Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS	*Rp 49,627,335,000.00*	*Rp 49,627,335,000.00*	*Rp -*	*0.00%*	7.83%
	- Belanja Pegawai Lainnya	*Rp 11,059,213,800.00*	*Rp 11,059,213,800.00*	Rp -	*0.00%*	1.74%
2 1 3	Belanja Subsidi	Rp 22,500,000.00	Rp 22,500,000.00	Rp -	0.00%	5.73%
2 1 4	Belanja Hibah	Rp 4,155,857,000.00	Rp 4,155,857,000.00	Rp -	0.00%	5.73%
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 3,072,573,692.00	Rp 3,072,573,692.00	Rp -	0.00%	0.61%
2 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	Rp 629,822,000.00	Rp 629,822,000.00	Rp -	0.00%	0.09%
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	Rp 25,173,860,922.00	Rp 25,173,860,922.00	Rp -	0.00%	3.84%
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	Rp 665,844,855.00	Rp 665,844,855.00	Rp -	0.00%	0.13%
2 2	BELANJA LANGSUNG	Rp 296,774,225,280.00	Rp 321,071,506,280.00	Rp 24,297,281,000.00	8.19%	50.63%
2 2 1	Belanja Pegawai	Rp 14,332,409,800.00	Rp 14,332,409,800.00	Rp -	0.00%	0.00%
2 2 2	Belanja Barang dan jasa	Rp 147,911,964,837.00	Rp 148,416,645,837.00	Rp 504,681,000.00	0.34%	0.00%
2 2 3	Belanja Modal	Rp 134,529,850,643.00	Rp 158,322,450,643.00	Rp 23,792,600,000.00	17.69%	0.00%
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (12,200,000,000.00)	Rp (12,200,000,000.00)	Rp -	0.00%	100.00%
3	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 12,200,000,000.00	Rp 12,200,000,000.00	Rp -	0.00%	100.00%
3 1	*PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH*	*Rp 29,146,031,362.00*	*Rp 29,146,031,362.00*	*Rp -*	*0.00%*	*82.30%*
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 28,846,031,362.00	Rp 28,846,031,362.00	Rp -	0.00%	81.27%
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp -	0.00%	1.03%
3 2	*PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH*	*Rp 16,946,031,362.00*	*Rp 16,946,031,362.00*	*Rp -*	*0.00%*	*100.00%*
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	38.48%
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	0.00%
3 2 5	Pinjaman Dana Bergulir	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp -	0.00%	61.52%
3 2 6	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp 16,646,031,362.00	Rp 16,646,031,362.00	Rp -	0.00%	61.52%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	*Rp -*	*Rp -*	*Rp -*		

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten	
3.	Kepala DPKD	
4.	Kabid Anggaran	
5.	Kasi Penyusunan APBD	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI